

**PEMBINAAN MANAJERIAL BAGI PENGELOLAAN
SEKOLAH WIRAUSAHA ‘AISYIYAH (SWA) KABUPATEN
PEKALONGAN**

Chalimah

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pekalongan
chalimah@unikal.ac.id

ABSTRACT

Managerial guidance for operating “Wirausaha “Aisyiyah School”(SWA), for making professionalism in SWA and build good coordination between all organisation structure. SWA build for helping to the poor people and using commitment in productive sector in economy as well as to get economic stabilisation for woman. SWA in Kabupaten Pekalongan was the first SWA ever build in Central Java Province. Almost 3 years the head of Aisyiyah branch pekalongan did not have commitment to gain SWA program, advantage and responsibility. The output target from this activity is to reform and to manage SWA in operation concept to become more professional which guidance with 4 management function consist of: planning, organizing, moving, supervising. We have using purposing discuss and workshop methodz. From this two in front, will be using for making reconstruction in SWA guidance which covering organisation structure in regional branch to do their job as well as on all procedure. Beside it, MEKPPDA will give mentoring toruling the coordination in order with PCA under consideration with SWA.

Keywords: Management, SWA, Professional

I. PENDAHULUAN

Perkembangan

kewirausahaan di Indonesia cukup mengembirakan. Meskipun pada kenyataannya, peminat Aparat Sipil Negera (ASN) masih cukup tinggi. Sekolah kewirausahaan, kursus-kursus kewirausahaan mulai tumbuh dan menjamur yang juga diikuti oleh datangnya dan tumbuhnya banyak tokoh-tokoh muda Indonesia yang menjadi pakar bisnis, mentor-mentor kewirausahaan serta konsultan-konsultan *entrepreneurship*. Berdirinya Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kaum perempuan adalah bagian integral Tanfidz Keputusan

Tanwir ‘Aisyiyah di Yogyakarta tahun 2012 yaitu; 1) Terbangunnya kesadaran perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat, 2) Menumbuhkan semangat kewirausahaan (entrepreneur) melalui penguatan dan pengembangan usaha mikro-kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat, 3) Minimnya lembaga pendidikan formal dan Non formal yang memberikan pendidikan kewirausahaan yang menggunakan metode mentoring.

Data BPS mengenai angka kemiskinan dan ketimpangan yang

semakin meningkat menimbulkan keprihatinan. Fenomena ini menjadi bahasan bagi para pengambil kebijakan dengan alasan bahwa selama beberapa dasawarsa (1998 - 2018) atau setelah Reformasi, Indonesia mencatat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 5% - 6% per tahun, yang menjadikan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan, dan pola ketimpangan di Indonesia tidak banyak mengalami penurunan. Kedua, sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia membuat kemajuan besar dalam mengentaskan kemiskinan absolut diukur dari tingkat konsumsi. Namun krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menunjukkan bahwa betapa rentannya kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat secara tajam dan berjuta-juta penduduk kembali jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hasil penelitian Ilham dan Pangaribowo (2015) terhadap teori Kuznets tentang Hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan menyebabkan ketimpangan meningkat kemudian menurun dengan adanya proses pembangunan ekonomi ternyata tidak terbukti untuk data 33 propinsi di Indonesia. Selama lebih empat dekade pembangunan ekonomi Indonesia, ketimpangan pendapatan fluktuatif meskipun secara nasional cenderung meningkat. Kebijakan pemerintah dengan mempertahankan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan tetapi ketimpangan pendapatan makin meningkat, artinya bahwa pertumbuhan yang dicapai hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia saja. Secara garis besar, Kabupaten Pekalongan memiliki angka statistik dasar kemiskinan yang lebih baik daripada angka statistik Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, pengurangan angka kemiskinan masih menjadi tujuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan target angka kemiskinan turun menjadi 9% di tahun 2021 (Tribun Jateng, 2018). Gubernur Jawa Tengah pun menyatakan dalam Surat Edaran Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bahwa target kemiskinan tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah dalam kisaran 9,93 – 10,40%. Di tahun 2017, angka kemiskinan untuk Kabupaten Pekalongan adalah 12,61%, masih di atas angka target pemerintah daerah dan pemerintah provinsi

Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan „Aisyiyah Pimpinan Pusat Aisyiyah (MEKPPA) mengemban misi antara lain mengembangkan, meningkatkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat, baik melalui pengembangan wirausaha maupun pelatihan ketrampilan dan jaringan usaha. Selain itu, melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja perempuan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga memiliki pemahaman dan mendapatkan haknya sebagai buruh, serta mendapat perlindungan hukum, yaitu

mengembangkan model pemberdayaan ekonomi melalui gerakan Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), koperasi, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan (*entrepreneur*) bagi masyarakat melalui Sekolah Wirausaha „Aisyiyah (SWA).

Berangkat dari kajian permasalahan kemiskinan di Indonesia dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah akibat dampak yang terjadi terutama bagi perempuan, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah mendirikan SWA pada tanggal 5 November 2013 dengan Kota Yogyakarta sebagai pilot project. Pemilihan daerah ini didasarkan pada kedekatan jangkauan dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah untuk melakukan koordinasi dan kemudahan akses bagi akselerasi pemberdayaan perempuan. Pada tanggal 17 Maret 2017 Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (MEKPDA) Kabupaten Pekalongan meresmikan SWA angkatan 1 merupakan yang pertama di Jawa Tengah. Pelaksanaan SWA Kabupaten Pekalongan yang telah berjalan selama 3 (empat) tahun ini tidak serta merta mendorong Pimpinan Cabang Aisyiyah untuk mengambil peran sebagai pengelola SWA. Tatakelola kelembagaan SWA sepenuhnya masih dilakukan oleh MEKPDA dan pelaksanaannya masih sebatas berjalan belum dilaksanakan secara profesional. Kegiatan SWA tidak mengacu pada asas-asas manajemen sebagaimana dikemukakan Zahro dan Chalimah (2016) diantaranya mencakup proses dari fungsi-fungsi, pelaksanaan tugas-

tugas, penggunaan sumber-sumber, pencapaian tujuan organisasi, dan dalam lingkungan yang berubah. Berdasarkan pengklasifikasian fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dikemukakan oleh orang pertama yang mengenalkan yaitu Henry Fayol antara lain *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling* maka muncul banyak varian fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengetahui pola kelembagaan SWA ini acuan yang digunakan berdasarkan pada pendapat George Terry yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Penjelasan dari teori GR Terry dalam Tona Aurora Lubis dkk (2015) bahwa pengertian perencanaan adalah adalah suatu kegiatan yang ditentukan sekarang, akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana harus memperhitungkan 3 hal yaitu : kondisi masa lalu, keadaan sekarang danantisipasi masa yang akan datang. Pengertian pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, serta pengaturan dari berbagai macam kegiatan usaha yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, menyuruh orang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Penggerakan (*actuating*) berarti indakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok (keluarga)berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Sedangkan pengertian pengawasan (*controlling*) sebagai proses untuk mengeliminir apa yang dilaksanakan,mengevaluasi pelaksanaan dan bila perlu menerapkan tindakan- tindakan korektif sehingga pelaksanaan sesuai rencana. Berdasarkan analisis

terhadap SWA maka fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasi, penggerakan, dan pengawasan belum optimal dilaksanakan.

II. METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan workshop. Menurut Dedeh (2005) FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2019 – Januari 2020. Pada bulan Oktober - November 2019 melakukan studi pustaka terkait dokumen pedoman dan data administratif pembelajaran SWA. Bulan Desember 2019 dilakukan FGD tentang pemetaan permasalahan pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan SWA. Bulan Januari-Februari 2020 dilaksanakan workshop pedoman tata kelola Sekolah Wirausaha Aisyiyah yang mengacu pada 4 (empat) fungsi manajemen tersebut diatas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh ciri liberal dan kapitalistik global membawa dampak makin melemahnya perekonomian masyarakat di level bawah. Hubungan segitiga (*triangle*) pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil penelitian Ilham dan Pangaribowo (2017) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi

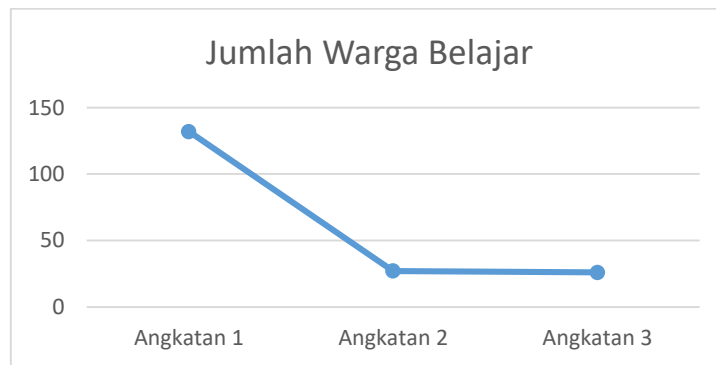
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau sekitar 20 persen golongan berpendapatan tinggi tetapi menguasai hampir 50 persen pertumbuhan. Kelompok ini yang menguasai faktor-faktor produksi penting seperti modal dan memiliki sumber daya manusia dengan produktifitas tinggi. Sehingga merekalah yang sebagian kecil kelompok masyarakat yang menikmati sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan semakin tinggi.

Kabupaten Pekalongan memiliki luas \pm 836,15 km terbagi menjadi 19 Kecamatan, 285 Kelurahan / desa, Dari 285 desa/kelurahan yang ada, 11 desa merupakan desa pantai dan 274 desa bukan desa pantai. Menurut topografi desa, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16 persen) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 219 desa/kelurahan (76,84 persen) berada di dataran rendah, serta dihuni oleh 819.892 jiwa (2018) dengan kepadatan rata-rata 1.067 jiwa/Km². yang terdiri dari laki-laki sebanyak 443.009 dan jumlah perempuan sebanyak 448.883. Keterbatasan lahan dan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan menimbulkan permasalahan kemiskinan dan berbagai dampak lainnya yang ditimbulkan. Berdasarkan data Susenas, Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan (dataran rendah) lebih kecil daripada di pedesaan (dataran tinggi) namun jumlah

penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan jumlah penduduk kota meningkat pesat. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pekalongan terbanyak di sektor perdagangan yaitu sebesar 71 usaha perdagangan toko, 1.200 usaha perdagangan Kios, dan 1,171 usaha perdagangan kecil

Potensi dan permasalahan ekonomi di Kabupaten Pekalongan

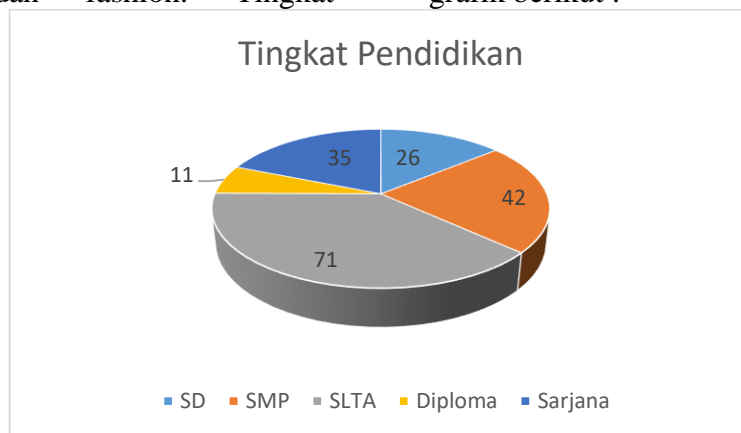
merupakan tantangan bagi MEKPDA dalam mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha baru terutama bagi kemandirian perempuan. Sampai saat ini SWA telah menghasilkan 185 warga belajar dari tiga angkatan. Jumlah warga belajar mengalami fluktuatif dan cenderung menurun sejak dibuka untuk angkatan pertama sebagaimana tercantum dalam grafik berikut :



Gambar 1: Jumlah Warga Belajar SWA

Berdasarkan jenis usaha warga belajar SWA 80% masih bergerak pada usaha kuliner. Selebihnya bergerak pada usaha reseller dan fashion. Tingkat

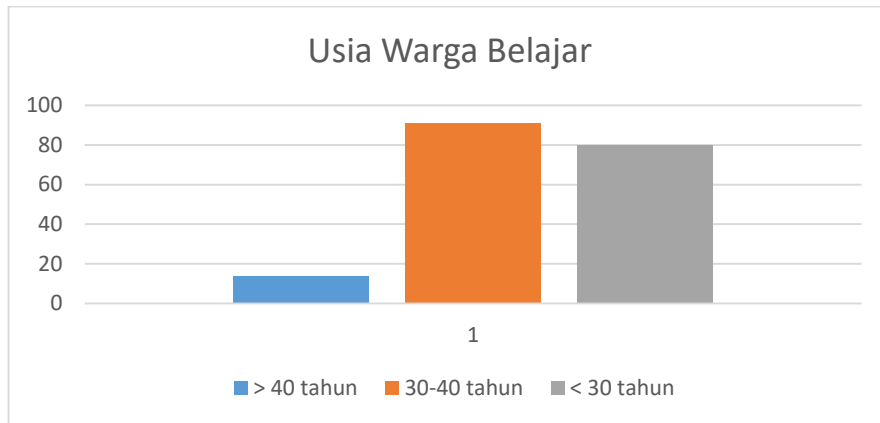
pendidikan berdasarkan urutan terbanyak adalah SMA (38%) dan lulusan Diploma paling sedikit (6%) sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 2: Tingkat Pendidikan Warga Belajar SWA

Usia warga belajar terbanyak berusia 30-40 tahun (49%) sedangkan usia di bawah 30 tahun sebanyak

43% dan di atas 40 tahun sebanyak 8% sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :



Gambar 3: Usia Warga Belajar SWA

SWA Kabupaten Pekalongan mensyaratkan usia Warga Belajar harus di bawah 40 tahun, namun karena memang anggota 'Aisyiyah itu rata-rata berumur di atas 40 tahun, maka terdapat 8 orang yang memiliki usia di atas 40 tahun.

Kompleksitas kondisi warga belajar menjadi tantangan bagi pengelola SWA dalam menyusun materi dan metode pembelajaran.

Berdasarkan panduan SWA, kurikulum pembelajaran SWA mengalami perubahan materi dan jumlah pertemuan. Pembelajaran angkatan pertama merupakan kurikulum awal dan tahapan ujicoba materi. Mulai pembelajaran angkatan 3 (tiga) materi pembelajaran sudah terstruktur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Kurikulum Pembelajaran SWA

No	Target Kompetensi	Target Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Standar Pemateri
1.	Membangun Mental Bisnis	Warga Belajar memiliki fondasi spiritual dan mental dalam menjalankan usaha	Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> • Dasar spiritual dalam bisnis • Membangun kekuatan mental bisnis 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	3 JPL	Narasumber yang memiliki kemampuan memotivasi dan memiliki pemahaman bisnis dengan dasar keislaman dan kemuhimmadiyah yang kuat

			<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan laba/rugi • Menyusun neraca 			
5.	Pemasaran Produk	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam menetapkan target konsumen, mendapatkan konsumen, memasarkan produk dan memperluas jaringan	Pemasaran Produk <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target konsumen • Menentukan kebutuhan konsumen • Menentukan harga produk • Membuat jalur distribusi produk • Menyusun program pemasaran (offline maupun online) 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 3. Roleplay	3 JPL	Narasumber yang memiliki pengalaman praktis dalam memasarkan produk serta memahami secara teoritis konsep pemasaran produk.
6.	Kemampuan mengatasi masalah usaha	Warga Belajar memiliki semangat dalam menjalankan usaha, pantang menyerah dan dapat mengatasi permasalahan usaha	Kesalahan dalam Usaha (7 Kesalahan Pengusaha Pemula) □ Memahami kesalahan yang dilakukan pelaku usaha pemula □ Mengatasi permasalahan usaha dengan benar	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	2 JPL	Narasumber yang memiliki pengalaman dalam usaha dan memahami langkah penyelesaian masalah usaha
7.	Membangun Jejaring Usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam membangun jaringan usaha	Membangun Jejaring Usaha <ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep distribusi • Memahami beberapa bentuk jaringan usaha • Menentukan jaringan usaha yang tepat • Teknik negosiasi 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	2 JPL	Narasumber yang memiliki pengalaman praktis dalam membangun jejaring usaha

8.	Ke 'Aisyiyahan	Warga Belajar dapat memahami tentang gerakan 'Aisyiyah	Ke 'Aisyiyahan <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Organisasi 'Aisyiyah • Amal Usaha 'Aisyiyah • Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad ke -2 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	2 JPL	Pimpinan 'Aisyiyah
9.	Kunjungan Usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan / gambaran dalam menjalankan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Usaha • Mentoring 	1. Berbagi Pengalaman Usaha 2. Tanya Jawab		Mentor yang berpengalaman dalam membangun usaha kreatif dan memiliki inovasi

Pelaksanaan pembelajaran angkatan 1 (pertama) sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan di kelas ditambah 2 kali kunjungan usaha. Sedangkan pada angkatan 2 dan 3 (kedua dan ketiga) dimulai dengan 4 (empat) kali pertemuan terdiri dari dua sesi dengan hitungan per jam pelajaran (jpl) adalah 45 menit. Problem utama dari pembelajaran sudah dapat teratasi dengan adanya kurikulum yang memadai namun dalam perkembangannya warga belajar membutuhkan pengetahuan tentang hal-hal teknis terkait *marketing online* dan perizinan. Dari hasil FGD, pengelola SWA menambahkan materi foto produk dan perizinan usaha sebagai materi tambahan dari kurikulum pembelajaran yang sudah ada. Selain pembenahan materi pembelajaran SWA, hasil workshop pengelolaan SWA menemukan beberapa hal sebagai berikut :

3.1 Perencanaan

Pembelajaran SWA diawal pembentukannya dirancang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam

setahun. Namun demikian dalam pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun. Hasil workshop SWA terkait perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian SWA. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran SWA diantaranya keterbatasan SDM dan ketersediaan anggaran. MEKPDA sudah melibatkan pimpinan Cabang 'Aisyiyah dalam menyusun rencana namun demikian tidak semua personil yang terlibat dapat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran maupun pengelolaan SWA. Berdasarkan hasil workshop pengelolaan SWA telah dirumuskan rencana pengembangan SWA sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu	Penanggung jawab
1	Pembentukan Pengelola SWA Cabang	Minggu ke 4 Desember 2019	MEKPDA dan PDA
2	Raker Alumni SWA	Januari 2020	Pengurus Alumni SWA
3	Pembuatan Kartu Anggota SWA	Januari 2020	MEKPPA
4	Diskusi Tematik	Pebruari 2020	MEKPDA dan Alumni SWA
5	Jambore SWA (Instruktur, Mentor, Warga Belajar)	November 2020	MEKPDA dan Alumni SWA
6	Gerai Produk Alumni	Maret 2020	MEKPDA dan Alumni SWA
7	Pembelajaran SWA	Pebruari dan Agustus	SWA
8	Promosi (Publikasi, berita) melalui media massa	Mulai Januari 2020	Pengelola SWA Cabang
9	Evaluasi materi pemebelajaran SWA	April dan Desember 2020	Pengelola SWA Cabang
10	Jejaring kerjasama dengan dengan BTM, BMI, LazisMU	Pebruari 2020	MEKPDA dan Pengelola SWA Cabang MEKPDA

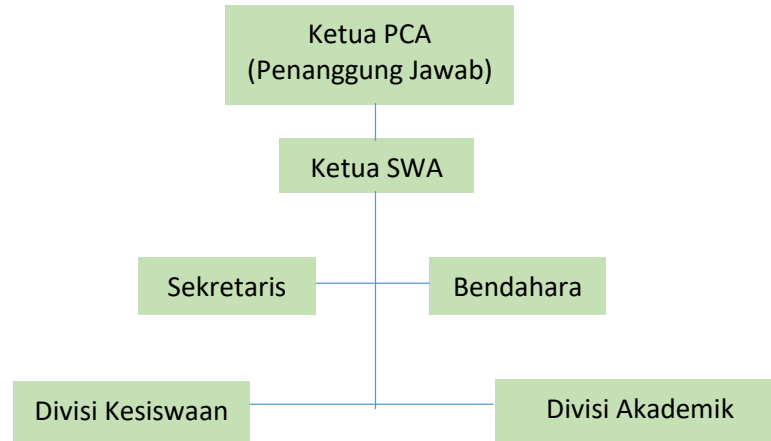
Rencana pengembangan ini hampir tidak terlaksana sebagaimana direncanakan. Personil yang diminta sebagai pengelola SWA tidak bisa menindaklanjuti dikarenakan kesibukan masing-masing. Ketua pengelola SWA yang berasal dari alumni SWA yang lebih banyak berperan untuk melaksanakan dengan jumlah personil SDM yang terbatas. Dalam waktu singkat untuk memenuhi target pembelajaran angkatan 4 (empat) telah diupayakan melalui sosialisasi pada pertemuan Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Daerah Aisyiyah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan, sosialisasi pada pengajian ‘Aisyiyah tingkat Cabang, penyampaian surat edaran dari Ketua Pimpinan Daerah ke seluruh cabang untuk mengirimkan peserta, dan menyebarkan informasi pendaftaran melalui media sosial.

3.2 Pengorganisasian

Pengelolaan SWA tidak dapat berhasil tanpa pengorganisasian yang baik. Panduan SWA belum menunjukkan bagaimana struktur organisasi pengelola SWA dibentuk. Banyak pertanyaan dari cabang yang ditujukan kepada MEKPDA terkait hal ini termasuk peran PCA yang secara eksplisit belum disebutkan dalam Panduan SWA. Berdasarkan penelusuran dokumen program kegiatan MEKPDA ditemukan bahwa peran dan fungsi PCA terdapat pada Tanfidz Keputusan Aisyiyah tentang panduan program kerja MEKPDA dalam pelaksanaan SWA. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada pelaksanaan kegiatan SWA. Tata kelola di tingkat PDA ini yang menjadi temuan dalam *workshop* tatakelola SWA yang menjadi masukan dalam penyusunan pedoman pengelolaan SWA. Soekanto (2005) membagi struktur organisasi menjadi lima kelompok yaitu struktur

organisasi fungsional, struktur organisasi proyek, struktur organisasi matriks, struktur organisasi usaha (*ventura*) dan struktur organisasi tim

kerja (*task force*). Dari kelima bentuk ini, struktur organisasi pengelola SWA mengacu pada struktur organisasi tim kerja yang terdiri dari :



Gambar 4: Struktur Organisasi Pengelola SWA

Jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara sudah dapat dipahami oleh pejabat pengelola SWA pada kepengurusan yang baru terbentuk untuk persiapan SWA angkatan 4 sedangkan divisi akademik dan kesiswaan masih perlu penjelasan. Hasil *workshop* menyebutkan bahwa tugas divisi akademik meliputi persiapan materi pembelajaran, menghubungi instruktur dan mentor, dan kegiatan administratif pembelajaran. Tugas Kesiswaan adalah mengkoordinir pendaftaran warga belajar, melayani kebutuhan warga belajar, dan menghimpun alumni warga belajar. Kedua tugas dan fungsi divisi ini sampai saat ini belum berjalan optimal sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dan penghimpunan alumni masih dikerjakan secara tim.

3.3 Penggerakan

Organisasi ‘Aisyiyah identik dengan organisasi gerakan pemberdayaan perempuan. Memasuki abad ke-2 gerakan Aisyiyah sudah menjangkau Internasional dengan adanya Aisyiyah cabang khusus di Malaysia, Mesir dan Taiwan. Aisyiyah berdiri di masa penjajahan dimana perempuan selalu ditempatkan di sisi tidak pas dalam kondisi ketertinggalan dan kebodohan. Keadaan yang kurang menguntungkan itu masih ditambah oleh paham budaya yang menempatkan perempuan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipahami oleh KHA Dahlan. Sehingga pandangan keIslamanpun pada saat itu masih menempatkan perempuan pada posisi kedua. Padahal Kyai dan Nyai Dahlan bersama para tokoh di awal Muhammadiyah berdiri memiliki pandangan keIslaman yang berkemajuan. Dimana Muhammadiyah meyakini jika nilai-

nilai ajaran Islam itu menempatkan posisi perempuan sama mulianya dengan posisi laki-laki dan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah ketaqwaannya. Aisyiyah berpandangan bahwa perempuan punya potensi yang diberikan Allah guna beribadah, berkarya secara luas, baik untuk diri, keluarga, maupun kepentingan kemanusiaan universal (Republika, 2017).

Implementasi keberpihakan Aisyiyah pada perempuan dilakukan melalui Sekolah Wirausaha Aisyiyah. Sejak awal SWA dibentuk sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan dan mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan. Struktur organisasi pengelola SWA tidak terpisah dari Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) sebagai penanggung jawab. Tugas PDA dituangkan dalam Program Kerja MEKPDA antara lain melakukan pembelajaran SWA, memfasilitasi mentoring warga belajar, memfasilitasi klinik konsultasi bisnis SWA, melakukan temu alumni SWA, melakukan gelar produk warga belajar dan alumni SWA, melakukan monitoring dan evaluasi untuk menganalisis keberhasilan kegiatan yang sudah berjalan, dan menyampaikan laporan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* secara periodik tentang kegiatan yang sudah berjalan dan kendala yang dihadapi di lapangan ke Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (MEKPPA).

Hasil *workshop* pengelolaan SWA menunjukkan bahwa PCA tidak melaksanakan tugas dengan baik. Keberadaan SWA di Cabang belum

menjadi bagian dari gerakan yang dilakukan di Cabang. Komitmen untuk melaksanakan SWA secara sungguh-sungguh tidak terwujud sehingga jumlah peserta semakin menurun dan pengelolaan SWA lebih banyak ditopang oleh MEKPDA. Pengelola SWA belum memahami tugas yang harus dilakukan dalam penjarangan warga belajar SWA dan cenderung bersifat pasif. Kendati instruktur dan mentor disediakan oleh MEKPDA belum muncul inisiatif pengelola untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran hingga pendampingan bagi alumni SWA. Ketidakhahaman PCA berimbas pada pengelola SWA yang tidak optimal. Gerakan pemberdayaan perempuan melalui SWA substansinya adalah gerakan advokasi. Menurut Wahyu, dkk (2017) advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Aisyiyah mengajak pimpinan di semua tingkatan untuk berkoordinasi mewujudkan misi Aisyiyah. Oleh karena itu tindak lanjut dari *workshop* adalah penyempurnaan panduan pelaksanaan SWA dengan memasukkan struktur organisasi dalam bentuk bagan disertai keterangan mengenai ketugasan masing-masing jabatan.

3.4 Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi program

SWA. Arikunto dan Jabar (dalam Muhammad dan Beny, 2019) menyatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Evaluasi ini meliputi kinerja pengelola SWA dan pengawasan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Panduan SWA yang memuat sistem pengendalian belum dipahami pengelola SWA. Sehingga pendampingan instrumen pengawasan menjadi tindak lanjut pada hasil *workshop* pengelolaan SWA. Sistem pengawasan termuat dalam panduan SWA. Tiga hal dalam pengendalian meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring bertujuan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan agar dapat secara langsung dan sedini mungkin dilakukan koreksi jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Cara pelaksanaannya dengan memberikan form evaluasi pembelajaran SWA kepada warga belajar dan pengelola SWA serta struktural pimpinan 'Aisyiyah dari Pusat hingga Daerah. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap pengambil kebijakan, pelaksana teknis maupun terhadap seluruh proses kegiatan pembelajaran SWA. Penilaian dilakukan oleh Pengelola SWA dan pimpinan struktural Aisyiyah dari Pusat sampai Daerah berkaitan dengan input, hasil setiap tahapan maupun tenaga pelaksana. Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan pembelajaran SWA yang telah dilakukan maupun

yang akan dilaksanakan. Subtansi laporan meliputi input kegiatan, seluruh pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan, keberhasilan yang dicapai baik pada setiap tahap kegiatan maupun hasil dari seluruh kegiatan, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan SWA di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya sudah berjalan namun belum optimal. Dari FGD dan *workshop* tentang fungsi manajemen diperoleh hasil bahwa perencanaan program SWA belum tertata dengan baik. Materi dan metode pembelajaran sudah tersedia namun pada tahap pelaksanaan tidak berjalan sesuai harapan. Proses pendaftaran peserta tidak direncanakan secara efektif sehingga jumlah warga belajar SWA cenderung mengalami penurunan. Alumni SWA kurang mendapat perhatian sehingga tahapan pengembangan SWA belum mengarah pada tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian SWA belum menunjukkan pembagian peran yang jelas. PCA tidak memahami tugas ketugasannya dalam menggerakkan roda organisasi dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan SWA di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal pengawasan, pengelola belum memahami bagaimana proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga pemahaman terhadap keempat fungsi manajemen ini hendaknya dipahami pengelola SWA sebagai satu kesatuan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan SWA yaitu menodorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan

meningkatkan jumlah perempuan sebagai pengusaha yang mandiri.

ilmiah Pekerjaan Sosial
Volume 16 Nomor 2 : 302-324

REFERENSI

Dedeh Fardiah, 2005, Focus Group Discussion dalam paradigma pembangunan Partisipatif, *jurnal MediaTor* Volume 6 Nomor 1

Zahro dan Chalimah, 2016, *Pengantar Manajemen*, Pekalongan, Unikal Press

Ilham Muhammad dan Pangaribowo Evita Hanie, 2017, Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Propinsi di Indonesia 2011 – 2015, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4 : 1-10

Muhammad Yusuf dan Beny Firman, 2019, Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Di Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo* Volume 3 Nomor 1 :31-38

Soekanto Reksohadiprodjo, 2005, *Organisasi dan Struktur Perusahaan*, Jakarta, Universitas Terbuka

Tona Aurora Lubis ,Zulkifli, Erwita Dewi. (2015), Peningkatan Keterampilan Manajemen dan Softskill Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 30, Nomor 3

Wahyu Nurharyati, A.Nelson Aritonang, dan Aribowo, 2017, Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung, *PEKSOS: Jurnal*